CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No. 9 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA

M. Ababiel Putra[1], Tio Tri Wijaya[2].
Email: tiowijayaa10@gmail.com

UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung

Abstract

Corruption remains a major challenge in Indonesia, affecting social, economic, and political stability. Efforts to eradicate corruption cannot rely solely on repressive legal enforcement but must also involve preventive approaches focusing on character building. This study aims to analyze the role of anti-corruption education as a pillar in shaping national character and to examine its implementation strategies within the education system. This research uses a qualitative approach with a library research method. The findings indicate that anti-corruption education plays a strategic role in instilling values such as integrity, honesty, responsibility, and social awareness. Furthermore, integrating anti-corruption education into formal and non-formal curricula can strengthen anti-corruption culture in society. Therefore, anti-corruption education serves as a crucial foundation in creating a generation with strong integrity and good governance.

Keywords*: anti-corruption education, character building, integrity, governance.*

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang berfokus pada pembentukan karakter individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan anti korupsi sebagai pilar dalam pembentukan karakter bangsa serta mengkaji strategi implementasinya dalam sistem pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Selain itu, integrasi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum formal maupun nonformal dapat memperkuat budaya anti

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

korupsi di masyarakat. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi yang berintegritas dan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kata kunci: pendidikan anti korupsi, karakter bangsa, integritas, moral.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena yang kompleks dan telah menjadi permasalahan struktural di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh. Dalam konteks birokrasi dan pemerintahan, korupsi seringkali terjadi secara sistematis dan melibatkan berbagai aktor, baik dari sektor publik maupun swasta. Hal ini menyebabkan korupsi sulit diberantas karena telah mengakar dalam sistem dan budaya organisasi.

Lebih jauh, korupsi juga berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena tidak mendapatkan haknya secara optimal. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta menghambat kemajuan bangsa.[1]

Selama ini, upaya pemberantasan korupsi lebih banyak dilakukan melalui pendekatan hukum, seperti penindakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Pendekatan ini memang penting untuk memberikan efek jera, namun belum mampu menyentuh akar permasalahan korupsi secara mendasar. Hal ini disebabkan karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai moral, integritas, serta budaya yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis sebagai sarana untuk membentuk karakter individu yang berintegritas. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembentukan nilai dan sikap. Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial sejak dini.[2]

Melalui pendidikan anti korupsi, peserta didik tidak hanya memahami definisi dan bentuk-bentuk korupsi, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini penting untuk membentuk generasi yang memiliki kesadaran moral serta komitmen untuk menolak segala bentuk praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam membentuk perilaku individu.

Namun demikian, implementasi pendidikan anti korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kurikulum yang belum secara optimal mengakomodasi pendidikan karakter secara menyeluruh. Selain itu, masih terdapat tenaga pendidik yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep dan metode pembelajaran pendidikan anti korupsi. Di sisi lain, budaya masyarakat yang masih permisif terhadap praktik korupsi juga menjadi hambatan serius dalam proses internalisasi nilai-nilai integritas.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai peran serta strategi pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter bangsa. Kajian ini diharapkan dapat memberikan

[1] Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0 (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 48.
[2] Dewi Anggraini, "Budaya Anti Korupsi dalam Sistem Pendidikan Nasional," Jurnal Integritas 9, no. 1 (2023): 60.

kontribusi dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dalam mencegah korupsi serta membangun generasi yang berintegritas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep pendidikan anti korupsi serta relevansinya dalam pembentukan karakter bangsa. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena sosial yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan nilai, norma, dan perilaku manusia.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, jurnal nasional dan internasional, artikel ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan korupsi dan pendidikan karakter. Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi terhadap topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan cara menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan antara teori yang ada dengan fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai peran pendidikan anti korupsi dalam pembentukan karakter bangsa.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, serta pendekatan normatif untuk mengkaji regulasi yang mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif serta solusi yang aplikatif.[3]

PEMBAHASAN

Peran Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter

Pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk karakter individu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, proses pembentukan karakter tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif atau pengetahuan semata, tetapi juga mencakup dimensi afektif dan psikomotorik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Oleh karena itu, nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian sosial harus ditanamkan secara berkelanjutan melalui proses pembelajaran yang sistematis dan terarah. Internalisasi nilai-nilai tersebut tidak cukup hanya dilakukan melalui penyampaian materi di dalam kelas, melainkan juga harus diwujudkan dalam praktik nyata yang dapat dialami langsung oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.[4]

Nilai kejujuran menjadi fondasi utama dalam pendidikan anti korupsi karena merupakan prinsip dasar yang menentukan kualitas integritas seseorang. Individu yang memiliki tingkat kejujuran yang tinggi cenderung memiliki komitmen moral yang kuat dalam menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk korupsi. Kejujuran tidak hanya berkaitan dengan sikap tidak berbohong, tetapi juga mencerminkan konsistensi antara nilai yang diyakini dengan tindakan yang dilakukan. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi berperan sebagai media untuk menanamkan kesadaran bahwa kejujuran merupakan nilai yang harus dijaga dalam setiap aspek kehidupan.

---

[3] Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2019),

[4] Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, dan Yanuarius Yanu Dharmawan, Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia (Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta, 2025), 58.

Selain kejujuran, nilai tanggung jawab juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu yang profesional dan berintegritas. Tanggung jawab mencerminkan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya secara optimal tanpa menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Individu yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pencegahan korupsi, karena banyak kasus korupsi yang terjadi akibat rendahnya rasa tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.[5]

Lebih lanjut, pendidikan anti korupsi juga berperan dalam membangun kesadaran kritis peserta didik terhadap berbagai bentuk dan modus operandi korupsi. Kesadaran kritis ini penting agar individu tidak hanya memahami korupsi sebagai konsep teoritis, tetapi juga mampu mengenali praktik korupsi dalam kehidupan nyata, baik yang bersifat terbuka maupun yang tersembunyi. Dengan adanya kesadaran tersebut, peserta didik diharapkan mampu bersikap lebih selektif dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang permisif terhadap korupsi. Bahkan, mereka dapat berperan aktif sebagai agen perubahan yang mendorong terciptanya budaya anti korupsi di masyarakat.

Dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi tidak hanya berkontribusi terhadap pembentukan karakter individu, tetapi juga terhadap pembangunan budaya sosial yang menjunjung tinggi nilai integritas. Ketika nilai-nilai anti korupsi telah terinternalisasi secara kuat dalam diri individu, maka akan terbentuk suatu sistem sosial yang secara kolektif menolak praktik korupsi. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi memiliki peran yang sangat fundamental dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan berintegritas tinggi.[6]

Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

Implementasi pendidikan anti korupsi dalam sistem pendidikan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi agar dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Pendidikan anti korupsi tidak dapat berdiri sendiri sebagai mata pelajaran yang terpisah, tetapi harus diintegrasikan ke dalam berbagai aspek pembelajaran dan kegiatan pendidikan. Dalam konteks pendidikan formal, nilai-nilai anti korupsi dapat dimasukkan ke dalam kurikulum melalui berbagai mata pelajaran, seperti pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, serta ilmu sosial. Integrasi ini memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai integritas dalam berbagai perspektif dan konteks kehidupan.[7]

Selain melalui kurikulum formal, implementasi pendidikan anti korupsi juga dapat dilakukan melalui penguatan budaya sekolah. Budaya sekolah yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan sekolah yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk membiasakan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi. Dalam hal ini, kebijakan sekolah, tata tertib, serta sistem evaluasi harus dirancang sedemikian rupa agar mampu mendukung terciptanya budaya integritas.

Kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Melalui kegiatan seperti diskusi, simulasi kasus, debat, serta kampanye sosial, peserta didik dapat belajar secara aktif dan partisipatif mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pembelajaran yang bersifat interaktif ini dinilai lebih efektif dalam menanamkan nilai-nilai moral dibandingkan dengan metode ceramah yang bersifat satu arah.[8]

---

[5] Zainudin Hasan, Tami Rusli, dan Nuris Sanida, Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), 30.

[6] Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 102.

[7] Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2016), 88.

[8] Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 67.

Peran guru sebagai teladan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan anti korupsi. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai figur yang memberikan contoh nyata dalam berperilaku. Sikap dan tindakan guru dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi referensi bagi peserta didik dalam membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, integritas dan profesionalisme guru harus terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Selain itu, keterlibatan orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Pendidikan karakter tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat akan menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pembentukan karakter individu secara holistik.[9]

Tantangan dan Solusi

Tantangan dalam implementasi pendidikan anti korupsi merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Salah satu tantangan utama adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai metode pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Banyak tenaga pendidik yang masih menggunakan pendekatan konvensional yang kurang mampu menyentuh aspek afektif peserta didik, sehingga nilai-nilai yang disampaikan tidak terinternalisasi secara optimal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan dalam implementasi pendidikan anti korupsi. Tidak semua lembaga pendidikan memiliki fasilitas dan dukungan yang memadai untuk mengembangkan program pendidikan karakter secara efektif. Kurangnya pelatihan bagi tenaga pendidik juga menyebabkan rendahnya kualitas implementasi pendidikan anti korupsi di lapangan.[10]

Di sisi lain, faktor budaya masyarakat yang masih permisif terhadap korupsi menjadi tantangan yang lebih kompleks dan sulit diatasi. Dalam beberapa kasus, praktik korupsi dianggap sebagai hal yang biasa dan bahkan menjadi bagian dari sistem sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang berfokus pada metode pembelajaran inovatif dan berbasis nilai. Selain itu, penguatan kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan anti korupsi secara sistematis juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi dalam mendukung implementasi pendidikan anti korupsi. Melalui media digital, peserta didik dapat mengakses berbagai informasi dan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Selain itu, kampanye anti korupsi melalui media sosial juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat secara luas.[11]

Dengan demikian, upaya penanggulangan korupsi melalui pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif, pendidikan anti korupsi dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk karakter bangsa yang berintegritas.

KESIMPULAN

Pendidikan anti korupsi merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan karakter bangsa yang berintegritas. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab,

[9] Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Internasional (Bandung: Mandar Maju, 2015), 73.
[10] Alina Mungiu-Pippidi, The Quest for Good Governance (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), 39.
[11] Ahmad Rizki, "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 30, no. 1 (2023): 125.

disiplin, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang bebas dari praktik korupsi.

Implementasi pendidikan anti korupsi memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat. Sinergi yang kuat antar pihak tersebut akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan karakter individu yang berintegritas.

Dengan demikian, pendidikan anti korupsi tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan korupsi, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Apabila pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, maka diharapkan akan lahir generasi yang mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. (2023). Budaya anti korupsi dalam sistem pendidikan nasional. Jurnal Integritas, 9(1), 60.

Atmasasmita, R. (2015). Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan internasional. Bandung: Mandar Maju.

Hamzah, A. (2017). Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hartanti, E. (2012). Tindak pidana korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Khairudin, Zainudin Hasan, Malik, & Yanuarius Yanu Dharmawan. (2025). Mereduksi korupsi untuk keberlanjutan di Indonesia. Banyumas: Ganesha Kreasi Semesta.

Rizki, A. (2023). Peran aparat penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(1), 125.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Winarno, B. (2016). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.

Zainudin Hasan. (2025). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press.

Zainudin Hasan, Tami Rusli, & Nuris Sanida. (2025). Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal. Bandar Lampung: UBL Press.